

IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE BERBASIS MASYARAKAT

IMPLEMENTATION OF THE SMART VILLAGE PROGRAM BASED COMMUNITY

Asaf Khatami Fatwa*, Ertien Rining Nawangsari

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: 20041010184@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program *smart village* di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Desa Plumpang beserta Staff Pegawai Desa dan masyarakat Desa Plumpang selaku pengguna program *smart village*. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara purposive sampling. Sedangkan analisis data menggunakan Teori Miles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu dengan *data collection*, *data condensation*, *data display* dan *conclusion drawing and verification*. Hasil penelitian dijelaskan dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, sebagai berikut : 1) Standard dan Sasaran Kebijakan telah berhasil terimplementasi, 2) Sumber Daya cukup berhasil terimplementasi. 3) Komunikasi cukup berhasil terimplementasi, masih ditemukan masyarakat yang belum tau program *smart village*. 4) Karakteristik Agen Pelaksana telah berhasil terimplementasi. 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik telah berhasil terimplementasi, masyarakat mendapat dampak yang positif dari sektor sosial, ekonomi dan politik. 6) Disposisi telah berhasil terimplementasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program *smart village* di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dapat dikatakan berhasil. Penelitian ini diharapkan menjadi temuan baru bahwa masih terdapat kekurangan dalam implementasi program *smart village* dan dapat menjadi perhatian pemerintah terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata kunci: *Smart village*, pelayanan publik, implementasi program

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the implementation of the Smart Village program in Plumpang Village, Plumpang District, Tuban Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The research informants were the Head of Plumpang Village along with Village Staff and the Plumpang Village community as users of the smart village program. Data collection methods use interviews, observation and documentation. Determining the data source in qualitative research is carried out using purposive sampling. Meanwhile, data analysis uses the theory of Miles, Huberman and Saldana (2014), namely data collection, data condensation, data display and conclusion drawing and verification. The research results are explained using the theory of policy implementation models from Donald Van Meter and Carl Van Horn, as follows: 1) Policy Standards and Targets have been successfully implemented, 2) Resources have been implemented quite successfully. 3) Communication has been implemented quite successfully, but there are still people who don't know about the smart village program. 4) The characteristics of the Implementing Agent have been successfully implemented. 5) Social, economic and political conditions have been successfully implemented, society has received a positive impact from the social, economic and political sectors. 6) The disposition has been successfully implemented. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the smart village program in Plumpang Village, Plumpang District, Tuban Regency can be said to be successful. It is hoped that this research will be a new finding that there are still shortcomings in the implementation of the smart village program and can be of concern to the relevant government to overcome these problems.

Keywords: *Smart village*, public services, program implementation

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tunjangan (2017) menyebut pemerintah perlu menjalankan tiga fungsi untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang baik. Salah satunya adalah fungsi pelayanan (*service*). Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melayani rakyatnya. Karena itu, wajib hukumnya

bagi suatu negara beserta para anggotanya untuk menjalankan tugasnya secara maksimal sebagai pelayanan publik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik sebagai suatu tindakan dari penyelenggara pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Para penyelenggara pemerintah dalam hal ini adalah seluruh aparat yang bekerja dalam lingkup organisasi sektor publik.

Hadirnya teknologi membuat pelayanan publik menjadi jauh lebih efektif dan efisien tentunya dengan hal tersebut akan mempermudah masya-

rakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik. Suatu inovasi yang diciptakan sebagai penunjang kegiatan pelayanan publik dengan teknologi disebut *electronic government (e-government)*. Pengembangan terhadap E-government didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.

Salah satu daerah yang telah memiliki produk hukum yang terkait dengan implementasi *e-government* adalah Kabupaten Tuban. Dalam mendukung penggunaan *e-government*, pemerintah Kabupaten Tuban mengeluarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2017 Tentang pengembangan *e-government* di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tuban. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk menjawab tuntutan tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban dibantu dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tuban untuk menyusun konsep *e-government* yang akan dijalankan nantinya. Selanjutnya, Kabupaten Tuban terus mengembangkan program dan aplikasi yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu program dan aplikasi yang diluncurkan adalah *Smart City*. Dalam pengembangan *Smart City* terdapat 6 (enam) pilar di dalamnya.

Tabel 1. Enam pilar smart city Kabupaten Tuban

No.	Program Smart City Kab. Tuban	OPD / Koordinator
1.	Smart Governance Smart Village / Desa Digital	- Diskominfo - Dipemasdes dan KB
2.	Smart Economy Wisata Pantai Semilir Desa Socorejo	- Dipemasdes dan KB - Pemasdes Socorejo, Kec. Jenu
3.	Smart Environment Gelar Sajadah	- Dinas Lingkungan Hidup
4.	Smart Society Tuban Digital Library	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Smart Living Sipalin CERIA	- RSUD Dr. R. Koesma Tuban
6.	Smart Branding Batik Gedog Tuban	- Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

Dari enam pilar diatas, yang menjadi program unggulan adalah *smart village*. *Smart Village* adalah pengembangan dari konsep kota cerdas untuk memberikan solusi bagi masalah di wilayah pedesaan. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat pedesaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya era digital.

Salah satu desa yang menjalankan program smart village adalah Desa Plumpang. Desa Plumpang merupakan desa di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Desa Plumpang merupakan desa dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan

Plumpang dan merupakan desa yang tergolong cukup pesat perkembangannya. Dari data sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Desa Plumpang berjumlah 9.366 dan menjadi desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Plumpang. Dengan kondisi geografis dan penduduk yang demikian membuat pelayanan publik menjadi hal yang harus diperhatikan. Pada tahun 2021 Desa Plumpang mendapatkan penghargaan sebagai desa dengan tata kelola administrasi berbasis TI terbaik III se Kabupaten Tuban. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. SE, beliau menyampaikan bahwasanya untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien pada era digital. Melalui Teknologi Informasi setiap desa diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam percepatan pelayanan publik.

Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan penulis pada 3 September 2023, dalam pengimplementasian kebijakan *smart village* belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan standard dan sasaran kebijakannya. Masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui adanya program *smart village* tersebut. Selain itu dari sektor Sumber Daya, menunjukkan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengerti mengenai produk-produk digital dan sarana prasarana pendukung yang ada di Desa Plumpang. Hal ini tentunya harus adanya pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya pada hal Komunikasi pemerintah Desa Plumpang kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Selain temuan awal diatas, kendala yang menjadi hambatan di implementasikannya program *smart village* di Desa Plumpang adalah tidak tersedianya Anjungan Pelayanan Mandiri. Anjungan Pelayanan Mandiri ini merupakan salah satu dari 4 (empat) produk pelayanan *smart village* diantaranya adalah website desa, wifi desa, aplikasi SEPASI dan Anjungan Pelayanan Mandiri Desa. Anjungan Pelayanan Mandiri sendiri merupakan sebuah alat yang ditanam sistem untuk membuat surat pengantar warga secara mandiri.

Dalam konteks implementasi program *smart village*, hingga saat ini masih belum ada penelitian khusus yang secara mendalam mengkaji program *smart village* di Kabupaten Tuban khususnya di Desa Plumpang. Hal tersebut terjadi karena program *smart village* merupakan program baru yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti implementasi program smart village di Desa Plumpang. Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program *Smart Village* Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, dengan analisis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

Terdapat enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Enam faktor tersebut adalah Standard dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi dan politik dan Disposisi.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, maka penelitian ini menggunakan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Fokus yang digunakan berpedoman pada teori Donalds Van Meter dan Carl Van Horn tentang model implementasi kebijakan. Terdapat 6 indikator yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Enam faktor tersebut adalah Standard dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi dan politik dan Disposisi.

Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara purposive sampling. Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa dokumen, situs web, artikel, jurnal, berita dan studi literatur lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan Teori Miles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu dengan data collection, data condensation, data display dan conclusion drawing and verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teknik pengumpulan data, yaitu observasi wawancara dan dokumentasi, berikut Implementasi Program Smart Village di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Berdasarkan pada fokus penelitian menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang terdiri dari 6 fokus yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program meliputi Standard dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi dan politik dan Disposisi adalah sebagai berikut:

Standard dan Sasaran Kebijakan

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur. Jika ukuran dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal (*utopis*), maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan (Agustino, 2016). Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2010:105) menjelaskan bahwa pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil,

bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Implementasi Program *Smart Village* Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sudah sesuai dengan standar pelaksanaan kebijakan berdasarkan regulasi diantaranya:

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sasaran dari program ini adalah masyarakat desa, dalam hal ini masyarakat desa Plumpang. Program tersebut diluncurkan guna untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang mana diantaranya program *Smart Village* tersebut didalamnya terdapat 4 elemen yaitu: Website Desa, APMD, Aplikasi SEPASI dan Wifi Desa.

Kepala Desa Plumpang menjelaskan bahwa program smart village ini merupakan pilar dari program smart city. Nantinya program ini difokuskan untuk mempermudah masyarakat desa dalam mendapatkan pelayanan dan juga informasi yang terkait dengan desa. Program *Smart village* ini fokusnya pada pelayanan desa, jadi didalamnya ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yaitu *website* desa, Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (APMD), aplikasi SEPASI dan wifi desa. Diharapkan nantinya masyarakat Desa Plumpang dapat mendapat kemudahan dalam pelayanan dan informasi yang berkaitan dengan desa

Berdasarkan hasil penelitian, fokus Standard dan Sasaran Kebijakan Program *Smart Village* di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban berhasil dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan sasaran dari program tersebut adalah masyarakat Desa khususnya Desa Plumpang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus Standard dan Sasaran Kebijakan Program *Smart Village* di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban berhasil terimplementasi.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:100) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun dukungan sumber daya non-manusia (*non-human resources*).

Ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia, pemerintah Desa Plumpang mempunyai 14 jumlah pegawai, dengan komposisi 5 pegawai negeri dan 9 lainnya pegawai non PNS dengan jumlah 12 laki-laki dan 2 perempuan. Dalam praktiknya para pegawai tersebut ditempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam implementasi program *Smart Village* pemerintah Desa Plumpang melimpah tugasnya kepada Bidang Pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam implementasinya program tersebut Desa Plumpang telah menjalankan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing.

Selain sumber daya manusia, sumber daya non manusia juga sangatlah penting. Dalam implementasi program *smart village* di Desa Plumpang sumber daya non manusia disini berupa fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam menunjang implementasi program tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, fasilitas yang diberikan adalah komputer dan juga jaringan internet atau wifi.



Gambar 1. Anjungan Pelayanan Mandiri Desa

Belum tersedianya Anjungan Pelayanan Mandiri Desa membuat pelayanan kurang maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi program *smart village* di Desa Plumpang cukup berhasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Plumpang Bapak Tumito, beliau menjelaskan bahwa dari 4 fasilitas yang ada dari program *smart village* ini Desa Plumpang belum punya alat APMD. Jadi APMD itu semacam alat yang konsepnya hampir sama seperti ATM, nantinya warga bisa mudah mendapatkan surat ataupun berkas tinggal scan KTP dan memilih berkas yang diperlukan tanpa harus antri seperti dulu.

Komunikasi

Grindle (2014) menyatakan hal yang sama bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan dan konsistensi pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana. Menganalogikan kebijakan sebagai pesan maka kemudahan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi faktor pesan, bentuk pesan, dan reputasi komunikatornya. Dalam implementasinya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Plumpang terbagi menjadi tiga, yaitu: koordinasi internal, koordinasi eksternal, dan sosialisasi masyarakat.

Implementasi program *smart village* koordinasi internal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Plumpang adalah dengan menjaga komunikasi dengan para pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan para pegawai menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan dan juga melaporkan apabila terjadi sesuatu di luar dari tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi eksternal dilakukan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban. Hal tersebut terjadi karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban ditunjuk sebagai OPD oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk membantu dan mengawasi implementasi program *smart village* tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Plumpang Bapak Tumito, beliau menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban juga melakukan survey lapangan dengan berkunjung ke balai desa guna untuk melakukan evaluasi secara langsung terkait implementasi program *smart village* di Desa Plumpang.

Selain koordinasi internal dan eksternal, hal lain yang harus diperhatikan adalah perhatian dari masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya program tersebut dibuat untuk masyarakat agar dapat mendapatkan pelayanan publik dengan baik.



Gambar 3. Sosialisasi Program Smart Village

Sosialisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hasil penelitian, pemerintah Desa Plumpang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, akan tetapi masih ditemui beberapa

masyarakat yang belum mengetahui program dan juga sosialisasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, fokus komunikasi implementasi program *smart village* di Desa Plumpang dapat dikatakan cukup berhasil.

Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat bawahan) bertindak dengan suatu cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan.

Proses implementasinya, pemerintah Desa Plumpang menggunakan metode *top down*, jadi semua perintah berasal dari Kepala Desa sebagai pemegang kuasa kemudian disalurkan ke bawah kepada pegawai/bidang yang telah ditunjuk. Selain itu dukungan pihak-pihak lain, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban. Dukungan yang diberikan berupa pembuatan website desa dan pelatihan pegawai desa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa fokus karakteristik agen pelaksana program *smart village* di Desa Plumpang dapat dikatakan berhasil. Dari hasil wawancara wawancara dengan Kepala Desa Plumpang Bapak Tumito, dirinya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program *smart village* terdapat peraturan / SOP yang harus dijalankan dan juga adanya sanksi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Shauma & Purbaningrum (2022), bahwa karakteristik dari pelaksana implementasi kebijakan sangat penting dalam kinerja implementasi kebijakan. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011), mengatakan bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka kebijakan akan gagal. Oleh karena itu, agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.
- 2) Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.

- 3) Dukungan yang berbagai sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya
- 4) Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain atau antara suatu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.
- 5) Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Sejauh ini dukungan dari sektor sosial atau masyarakat Desa Plumpang sangat mendukung program *smart village* tersebut. Dari hasil penelitian, mereka memberikan dukungan karena dengan adanya program tersebut pelayanan yang didapatkan lebih baik. Selain itu, dampak dari adanya program *smart village* ini masyarakat dapat mengakses fasilitas yang tersedia seperti wifi gratis. Hadirnya wifi gratis ini membuat masyarakat dapat menikmati internet dan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Meskipun dalam implementasi masih ditemukan beberapa masyarakat yang belum mengetahui program tersebut.

Selain dukungan sektor sosial, sektor ekonomi juga sangat penting. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam implementasi program *smart village*, pemerintah Desa Plumpang menggunakan dana desa untuk menunjang keperluan terkait dengan implementasi program *smart village*. Dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan elektronik komputer dan juga jaringan wifi.

Sama halnya dengan sektor sosial, hadirnya *smart village* ini berdampak pada sektor ekonomi. Adanya website desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana promosi produk lokal unggulan. Sehingga dengan adanya media promosi tersebut diharapkan produk-produk tersebut dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, fasilitas website desa juga dapat digunakan sebagai sarana informasi yang berkaitan dengan politik, seperti informasi Pemilu dan lain-lain. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa fokus kondisi sosial, ekonomi dan politik program *smart village* berhasil terimplementasi

Disposisi

Van Meter dan Van Horn juga Edward III dalam Subarsono (2011) menyatakan bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementor*) untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi program *smart village* di Desa Plumpang

ingin berhasil, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan tersebut secara demokratis, antusias dan responsif kepada masyarakat.

Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan para pelaksana sangat mendukung adanya program *smart village* ini. Selanjutnya mengenai pemahaman Aparat Desa Plumpang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sudah berjalan dengan baik, karena setiap beban pekerjaan yang diberikan kepada para pegawai sudah diatur melalui struktur organisasi, sehingga tugas yang menjadi tanggung jawabnya dilakukan dengan baik. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai pemerintah desa juga sangat baik dan ramah, hal ini tentu memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Selain dukungan dari pelaksana atau implementor dukungan masyarakat Desa Plumpang juga sangat baik, mereka sangat mendukung adanya program tersebut.

Hermayanti & Yuwono (2020) menyebutkan di Desa Banyuanyar – Boyolali, terjadi adanya penolakan oleh masyarakat karena dinilai program *green smart village* meribetkan masyarakat desa karena harus berkaitan dengan teknologi digital. Di sisi lain, implementasi program *smart village* di Desa Plumpang menunjukkan bahwa masyarakat mendukung dan ikut berpartisipasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fokus disposisi implementasi program *smart village* di Desa Plumpang dapat dikatakan berhasil.

KESIMPULAN

Implementasi program *smart village* di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dapat dikatakan berhasil, namun kurang sempurna. Peneliti masih menemukan dua variabel yang belum terimplementasi dengan baik, yaitu Variabel Sumber Daya Dan Komunikasi. Variabel sumber daya terdapat kekurangan dengan tidak tersedianya APMD atau Anjungan Pelayanan Mandiri Desa, yang merupakan salah satu dari empat fasilitas yang diberikan oleh program *smart village*. Sedangkan Variabel Komunikasi masih ditemukan kekurangan pada aspek sosialisasi, terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program *smart village* ini. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi tidak berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Nurrahman, Muhamad Dimas, Muhammad Falakhuddin Ma'sum, Muhammad Farhan Ino, Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Garut, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi*

- Pemerintahan: Vol 3 No 1 (2021): *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*
- Alhari, M. I., Febriyani, W., Jonson, W. T., & Fajrillah, A. A. N. (2021). Perancangan Smart Village Platform Aplikasi Edukatif untuk Monitoring Desa. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 15(1), 51–60.
- ALHARI, Muhammad Ilham et al. Perancangan Smart Village Platform Aplikasi Edukatif untuk Pengentasan Stunting serta Monitoring Kesehatan Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, [S.l.], v. 15, n. 1, p. 51-60, apr. 2021. ISSN 2580-8397.
- Amelia, Shinta & Nawangsari, Ertien Rining. (2021). Implementasi Urban Farming sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan pada Masa Pandemi Covid -19. *Jurnal GOVERNANSI*, 7(2) : 121-130.
- Andari, R. N & Ella, S. (2019). Pengembangan Model Smart Rural untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 41–58.
- Anwar, G., & Abdullah, N. N. (2021). The Impact of Human Resource Management Practice On Organizational Performance. *International journal of Engineering, Business and Management (IJEEM)*, 5(1), 35–47.
- Aziiza, A. A., & Susanto, T. D. (2020). The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 722(1), Article 012011.
- Herdiana, D. 2019. Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia. *IPTEK KOM*, 1-16.
- Hermayanti, E. S., & Yuwono, T. (2020). Implementasi Green Smart Village di Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 121-130. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciro Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–212. <https://doi.org/10.51817/prj.v8i3.298>
- Jusniaty., Asriadi, A. R., Jamaluddin, A., Abdullahi, A.B. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Smart Village di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjani. *Prosiding KN-9 APPPTMA*, 369–378. Malang.
- Kaspul, K., & Zulkarnaini, Z. (2022). Implementasi Penghapusan Aset Kendaraan

- Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru. *Policy and Social Review*, 2(1), 33-36.
- Kurnianingsih, I., Yugaswara, H., Suhaeri, S., Wardiyono, W., & Rosini, R. (2020). PKM Smart Village Melalui Pengelolaan Perpustakaan Desa Rintisan Berbasis Teknologi Informasi di Desa Bantarsari Bogor. *Jurnal Abdinus: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 4(1), 63–74.
- Laksono, Nurfi Fuadi dan Chawa dan Yayuk, Yulianti. 2020. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sawentar). *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 5 (4): 865–78.
- Lestari, L., & Zulkarnaini, Z. (2023). Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 276-286.
- Maharani, E. N., & Kencono, D. S. (2021). Penerapan Smart Governance Dalam Smart Village Di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 25-38.
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623-636.
- Metanfanuan, T., MM, M. A. T. H. S., Indra Krishernawan, S. E., Lestari, N. P., Ginting, S., Supriyanto, E. E., ... & Nugroho, L. (2021). Pengantar Manajemen Potensi Desa: Aku Yakin desaku Punya Sejuta Potensi. *Agrapana Media*.
- Mustanir, A. (2020). Implementasi E Government Pemerintahan Desa Dalam Administrasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Web Site Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang). <https://doi.org/10.31219/osf.io/9v273>
- Nurjayadi, N, T., Herwin., & Andesa, K. (2020). Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat melalui Kegiatan Smart Village pada Desa Rimba Makmur Kabupaten Kampar. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 140–151.
- Ridhawati, E., Fitriani, Y., Sari, D. N., P, P., & Pratama, R. (2019). Penerapan E-government pada Pekon Sukamulya (Studi kasus: Pekon Sukamulya Pringsewu. *Jurnal Cendikia*, 17(1 April), 246–250.
- Said, B., & Prasetyo E.P., F. (2019). Layanan e-Surat Berbasis Mobile Application di Desa Waru Barat Pamekasan. *InfoTekJar (Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan)*, 4(1), 111–115. <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v4i1.1637>
- SaidahN., KhasanahL., Asriyatuzzahra, & RidloahS. (2022). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village: Analysis of the Success Strategy of Krandegan Digital Village in Supporting the Smart Village Program. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 6(2), 123-135. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.123-135>
- Subhan, M., Zulkarnaini, Z., Meiwanda, G., & Putri, R. A. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439-454.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sumartono, S., Yuliani, F., & Zulkarnaini, Z. IMPLEMENTASI Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Penggerak Tingkat Sma Di Kabupaten Rokan Hilir. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 22(1), 65-77.
- Utmay, N., & Agustin, H. (2020). Evaluasi Keberhasilan Sistem Keuangan Desa Menggunakan Delone & Mclean Is Success Model. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3216–3235.
- Walfikri, W., & Zulkarnaini, Z. (2024). Implementasi Program Perpustakaan “KEREN” di Kelurahan Air Putih Kota Pekanbaru. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 14-21.
- Yuliani, F., Zulkarnaini, Z., Saktioto, S., & Sadad, A. (2022). The Protection Policy Of The Hydrological Unity Of Peat Lands In Riau Province, Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), 283-297.
- Zulkarnaini, Z., & Andri, S. (2023). Kapabilitas Dynamic Governance Koordinator Pendidikan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(4), 1-8.
- Zulkarnaini, Z., & Mashur, D. (2019, October). Development Of Local Economic Independence Through Optimizing Of Village Fund Management. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 298-302).